

**ANALISIS KEBIJAKAN ETHIOPIA DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN *GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM* DI
SUNGAI NIL DITINJAU DARI TEORI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH RICHARD SNYDER TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SRI RAHAYU

18323212

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN ETHIOPIA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN
GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM DI SUNGAI NIL DITINJAU DARI
TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH RICHARD SNYDER TAHUN
2011-2015**


Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Yogyakarta 24 Januari 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

2 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Januari 2023


Sri Rahayu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul Faktor Pendorong Kebijakan Trump Keluar Dari Paris Agreement Dilihat Dari Perspektif Decision Making tahun 2016-2020 dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini tentu banyak sekali dukungan serta bantuan yang senantiasa diberikan oleh keluarga, dosen, serta rekan-rekan seperkuliahan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai dukungan dan bantuan yang hendak disampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia serta rahmat-Nya untuk senantiasa memberi kekuatan, kemudahan dan menjadi sebaik-baiknya pelindung dan penolong hamba nya.
2. Untuk diri ku sendiri, karena telah berjuang dengan penuh semangat sehingga dapat menyelesaikan salah satu kewajiban perkuliahan dengan sangat baik hingga bisa sampai di proses pengerjaan skripsi dan sidang akhir.
3. Bapak Abdullah dan Ibu Samadiah yang sudah membiayai ku selama berkuliah di UII, selalu mensupport dalam proses perkuliahan, serta mendoakan kelancaran anaknya untuk meraih gelar S1.

4. Kak T dan Kak Andot yang juga menjadi support system selama perkuliahan di Jogja dan ikut memberikan uang jajan adiknya yang boros ini.
5. Sakameri Ghiyats Syah, keponakan ganteng ku yang sudah menjadi penghibur di rumah Benete menemani nenek dan kakek nya yang sedih ditinggal anaknya perkuliahan.
6. Pak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi sampai dengan lulus kuliah.
7. Dina Nur Ayu yang sudah menemani dan menjadi teman seperjuangan selama mengerjakan dan melewati segala bentuk drama skripsi.
8. Teman-teman kelas D yang telah mewarnai masa perkuliahan saya selama di Jogja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	20
1.8.4 Proses Penelitian	20
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMBANGUNAN <i>GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM</i> (GERD) SEBAGAI UPAYA NEGARA HULU DALAM MEMPEROLEH KEMERATAAN AIR DI SUNGAI NIL	22
2.1 Hegemoni Mesir dan Sudan di Sungai Nil	22
2.2 Bangkitnya Negara Hulu Sebagai Upaya Perlawanan	26
2.2.1 Pembentukan Nile Basin Initiative (NBI)	28
2.2.2 Pembentukan Cooperative Framework Agreement (CFA)	29
2.3 Respon Mesir dan Sudan Terhadap Pembangunan <i>Grand Ethiopian Renaissance Dam</i> (GERD)	30

2.3.1 Mesir dibawah Pemerintahan Mohamed Mursi	30
2.3.2 Mesir dibawah Pemerintahan Abdul Fattah Al-Sisi	32
2.3.3 Respon Sudan terhadap Pembangunan Bendungan	33
BAB III UPAYA ETHIOPIA MEMBANGUN <i>GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM (GERD) DILIHAT DARI PERSPEKTIF <i>DECISION MAKING THEORY</i> OLEH SNYDER</i>	34
3.1 Faktor Internal Setting	34
3.1.1 Non Human Environment: Posisi Geografis Ethiopia terhadap Sungai Nil Biru	35
3.1.2 Human Environment: Kepentingan Domestik Ethiopia Sebagai Sebuah Kebijakan	37
3.2 Social Structure and Behavior	41
3.2.1 Major Common Orientation Value: Dampak Proyek Pembangunan GERD bagi Masyarakat Ethiopia	41
3.2.2 Major Institutional Pattern: Prinsip Kebijakan Luar Negeri Ethiopia Terhadap Pembangunan GERD	44
3.3 Faktor <i>Eksternal Setting</i>	46
3.3.1 Societies Organized and Functioning as States and Government Action: Dukungan Tiongkok	47
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51
Daftar Pustaka	53

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1 Wilayah Aliran Sungai Nil.....	2
Gambar 2 Skema Proses Decision Making.....	11
Tabel 1 Alur Perjanjian Sungai Nil 1929 dan 1959.....	26

DAFTAR SINGKATAN

AfDB : *The African Development Bank*

BRI : *Belt and Road Initiative*

CFA : *Cooperative Framework Agreement*

DoP : *Declaration of Principles*

GERD : *Grand Ethiopian Renaissance Dam*

IBRD : *International Bank for Reconstruction and Development*

NBI : *Nile Basin Initiative*

PM : *Perdana Menteri*

ABSTRAK

Sungai Nil merupakan sungai terbesar yang terletak di kawasan Afrika. Besarnya kekuatan yang mampu diberikan sungai Nil ternyata tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara-negara aliran, hal tersebut dikarenakan adanya hak veto yang dimiliki Mesir dan Sudan atas sungai Nil melalui perjanjian tahun 1929 dan 1959. Penggunaan air Nil yang dilakukan sepihak oleh Mesir dan Sudan selama bertahun-tahun menyebabkan terjadi perlawanan dari negara hulu. Ethiopia yang memimpin negara hulu mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan raksasa yang dinamai *Grand Ethiopian Renaissance Dam*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan buku, jurnal maupun artikel ilmiah. Penjelasan terkait sengketa di sungai Nil coba dijelaskan melalui perspektif *Decision Making Theory* oleh pemikiran Snyder. Teori tersebut berhasil menyimpulkan apa saja usaha yang dilakukan Ethiopia serta alasannya membangun bendungan ditinjau dari variabel internal, sosial dan eksternal.

kata kunci: *Ethiopia, GERD, Mesir*

ABSTRACT

The Nile River is the largest river located in Africa. The amount of power that was able to be given by the Nile River turned out to be unable to be utilized by all streams of countries, this was due to the veto rights that Egypt and Sudan had over the Nile through agreements in 1929 and 1959. The use of Nile water was carried out unilaterally by Egypt and Sudan during for years led to resistance from upstream countries. Ethiopia, which leads the upstream country, issued a policy to build a giant dam named the Grand Ethiopian Renaissance Dam. This research uses qualitative methods by utilizing books, journals and scientific articles. An explanation regarding the dispute on the Nile is trying to be explained through the perspective of Decision Making Theory by Snyder's thinking. The theory succeeded in concluding what efforts were made by Ethiopia and the disadvantages of building a dam in terms of internal, social and external variables.

keywords: *Ethiopia, GERD, Egypt*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai Nil merupakan sungai terbesar di kawasan Benua Afrika dan sekaligus menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia, dimana panjang sungai Nil mencapai 4,160 mil atau sekitar 6,671 km. Aliran Sungai Nil melewati 11 negara, negara-negara yang dialiri tersebut antara lain adalah Ethiopia, Burundi, Eritrea, Kenya, Rwanda, Zaire, Republik Demokrasi Kongo, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania dan Mesir. Keberadaan sungai Nil sangat penting, mengingat kawasan Afrika merupakan kawasan yang sangat tandus dan kekurangan air, sehingga hal tersebut membuat negara-negara yang dilalui aliran Sungai Nil khususnya negara hulu terus melakukan upaya dalam memaksimalkan jatah air volumetrik mereka (Swain 2011). Sungai Nil yang merupakan sungai dengan aliran terbesar di kawasan Afrika pada kenyataannya tidak memberikan manfaat terhadap kebutuhan air negara-negara kawasan Afrika khususnya negara hulu sungai tersebut, hal ini dikarenakan hegemoni Mesir dan Sudan sebagai negara hilir yang memiliki *status quo* terhadap Sungai Nil yang dibuat pada perjanjian tahun 1929 dan 1959 bersama Inggris (Châtel and Oestigaard 2007).

Gambar 1 Wilayah Aliran Sungai Nil



Mesir dan Sudan yang merupakan negara hilir memiliki kekuasaan penuh atas Sungai Nil, hal tersebut disebabkan oleh adanya perjanjian pengelolaan air sungai Nil yang ditandatangani Mesir dan Sudan bersama Inggris pada tahun 1929 dan 1959 dengan tidak melibatkan negara hulu. Perjanjian tahun 1929 dan 1959 yang ditandatangani Mesir di era kolonial Inggris tersebut berisikan tentang jaminan Inggris bahwa tidak akan ada proyek yang akan mengancam Mesir, dan segala proyek yang dilakukan di Sungai Nil harus melalui izin Mesir, Mesir memiliki hak volumetrik air sungai Nil sebesar 55,5 miliar meter kubik per tahun dan Sudan sebesar 18,5 miliar meter kubik per tahun. Perjanjian yang ditandatangani Mesir bersama Inggris tersebut menjadi *natural and historic rights* negara-negara hilir, yani Mesir dan Sudan (Châtel and Oestigaard 2007).

Ethiopia merupakan salah satu negara hulu sungai Nil dan merupakan negara termiskin di kawasan Afrika, meskipun lokasi Ethiopia yang sangat strategis.

Namun, karena adanya perjanjian di tahun 1929 dan 1959 yang membuat Mesir dan Sudan mendominasi sungai Nil tersebut membuat Ethiopia tetap menjadi salah satu negara paling miskin di Afrika bahkan di dunia. Ethiopia yang terus dilanda kemiskinan akhirnya pada tahun 2011 melakukan upaya *equitable sharing* dengan mengeluarkan kebijakan terhadap pengembangan sumber daya air dengan membangun sebuah bendungan raksasa yang diberi nama *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) (Tandirerung 2014). Bendungan yang akan dibangun ini mampu menampung 63 miliar air per kubik. Proyek pembangunan GERD tentu mendapat penolakan keras dari Mesir, mengingat Mesir merupakan negara hilir yang mana apabila bendungan raksasa tersebut dibangun, otomatis akan berdampak besar terhadap kapasitas volume air yang mengalir ke Mesir, dan hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat perekonomian Mesir akibat adanya pembagian air tersebut. Pembangunan GERD inilah yang menjadi awal mula dan penyebab terjadinya konflik negara-negara aliran sungai Nil terutama Mesir dan Ethiopia atas klaim hak dan akses terhadap sungai Nil (Gebreluel 2014).

Dalam upaya menjalin kerjasama untuk mendukung terciptanya pembagian hak atas sungai Nil yang merata bagi negara-negara hulu maupun hilir melalui *Grand Ethiopian Renaissance Dam*, Ethiopia yang memimpin proyek tersebut bersama negara hulu lainnya seperti Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania dan Rwanda telah melakukan berbagai strategi. Pada tanggal 13 Juni 2013 negara-negara hulu meratifikasi *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA). *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) yang diinisiasikan oleh negara-negara hulu merupakan hasil negosiasi multilateral antara negara-negara yang dialiri oleh sungai Nil baik negara hulu maupun negara hilir, tujuan yang ingin

dicapai dari *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mewujudkan distribusi yang adil bagi setiap negara aliran sungai Nil guna mewujudkan peningkatan ekonomi dengan pemanfaatan air yang adil (Tandirerung 2014).

Penolakan Mesir terhadap pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) membuat konflik ini menjadi berkepanjangan. Dalam perkembangannya, pembangunan bendungan GERD terus dicari jalan tengahnya, salah satunya adalah dengan dibentuknya kerjasama antar pemerintah di negara-negara bagian cekungan sungai Nil yang disebut dengan *The Nile Basin Initiatives* (NBI) pada tahun 1999 dengan basis utamanya adalah “kerjasama yang dapat diterima oleh seluruh pihak”. Tujuan utama dari dibentuknya perjanjian *The Nile Basin Initiatives* (NBI) adalah sebagai upaya untuk mengembangkan landasan utama yang kuat atas sungai Nil, pembagian keuntungan dari segi sosio-ekonomi substantif, serta menciptakan dan meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan yang dialiri Sungai Nil (Cascão 2009).

Tujuan dari perjanjian CFA maupun NBI sangat sulit dicapai, hal tersebut dikarenakan adanya gejolak politik yang timbul akibat perbedaan dari kepentingan negara-negara hulu maupun hilir (Gebreluel 2014), namun hal tersebut tidak menyudutkan usaha Ethiopia. Ethiopia menjadi negara yang memberikan dampak signifikan terhadap sengketa sungai Nil, kebangkitan Ethiopia pada pertengahan tahun 1990-an menjadi langkah tegas negara tersebut untuk mewujudkan tujuan dari perjanjian *The Nile Basin Initiatives* (NBI) maupun *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA). Ethiopia merupakan negara pencetus sekaligus pemimpin dalam upaya negara-negara hulu mencegah Mesir dan Sudan

mempertahankan *status quo* mereka terhadap sungai Nil dan berupaya menerapkan perjanjian multilateral berbasis prinsip “*equitable sharing*”. Pada bab selanjutnya penelitian ini akan membahas dan mendalami lebih lanjut terkait apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Ethiopia bersikeras untuk membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di lembah Sungai Nil Biru melawan status quo yang dimiliki Mesir dan Sudan terhadap sungai Nil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang konflik sungai Nil yang sudah penulis jabarkan diatas, maka peneliti mencoba untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, **faktor apa saja yang mendorong Ethiopia membangun bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) melawan dominasi Mesir dan Sudan atas sungai Nil?**

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa saja permasalahan yang menjadi sengketa bagi negara hulu dan hilir terhadap sungai Nil.
2. Untuk menjelaskan alasan Ethiopia mengeluarkan kebijakan serta upaya yang dilakukan Ethiopia dalam pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD).

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian yang membahas tentang sengketa pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) ini, penulis memfokuskan penelitian pada sudut pandang Ethiopia, dimana penulis ingin menjelaskan apa saja faktor yang membuat Ethiopia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan GERD serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses pembangunan bendungan yang menjadi bentuk keberhasilan Ethiopia melawan dominasi Mesir dan Sudan terhadap sungai Nil. Selain membahas terkait faktor Ethiopia membangun bendungan, penulis juga akan menjelaskan bagaimana ketegangan yang terjadi di sungai Nil sebelum dan sesudah adanya pembangunan bendungan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan terkait sengketa bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) ini pada tahun 2011 hingga 2015, dimana kedua tahun tersebut penulis jadikan acuan karena pada tahun 2011 bendungan GERD akhirnya diresmikan pembangunannya oleh Perdana Menteri Ethiopia yaitu Meles Zenawi, kemudian pada tahun 2015 dimana terjadi perubahan sikap yang dilakukan oleh Mesir yang semula menolak kerjasama dengan negara-negara hulu di sungai Nil mejadi ikut serta dalam Kerjasama yang ditandai oleh adanya pergantian rezim pemerintahan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Cascò di dalam tulisannya yang berjudul "*Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs Cooperation?*" mencoba untuk mengidentifikasi dimana dan bagaimana hubungan kekuasaan di Nile Basin telah berubah selama dekade terakhir, dan mencoba menganalisa bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi hubungan politik antara negara hulu maupun hilir dan

terhadap pengelolaan alokasi sungai Nil. Artikel ini menyoroti perubahan politik ekonomi yang berlangsung di negara hulu, dan mencoba mengkaji bagaimana dinamika ini dapat mempengaruhi dan menantang keseimbangan kekuatan regional dan proses kerjasama regional yang berlangsung.

Menurut argumen dari Gebreluel dalam tulisannya yang berjudul “*Ethiopia's Grand Renaissance Dam: Ending Africa's Oldest Geopolitical Rivalry?*” sengketa atas sungai Nil dilatarbelakangi oleh adanya tekanan domestik yang dialami negara-negara hulu akan ketersediaan sumber air yang buruk di negaranya, negara-negara hulu yang menginginkan terbentuknya keadilan atas air sungai Nil melawan hegemoni Mesir, mengingat Mesir memiliki status quo atas Sungai Nil, dan hal tersebut menjadi penanda bahwa telah muncul kekuatan oleh negara-negara hulu dalam memangkas ketidakadilan terhadap pembagian air sungai Nil. Didalam tulisan dari Gebreluel menekankan juga pada peran Ethiopia dalam keberhasilannya menyatukan negara-negara hulu dalam meratifikasi CFA.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Tandirerung yang berjudul “Faktor Domestik Ethiopia meratifikasi *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* Tentang Manajemen Retribusi Aliran Sungai Nil Tahun 2013” menjelaskan tentang NBA dan CFA yang merupakan kerjasama multilateral pertama yang melibatkan negara-negara hulu dan hilir sungai Nil. Peran Yang dimiliki Ethiopia dalam meratifikasi pembangunan bendungan GERD membuatnya dilihat sebagai negara terdepan yang berhasil dan berani mengambil tindakan dalam melawan Mesir, mengingat besarnya kekuatan Mesir terhadap lembah sungai Nil. Di dalam tulisannya Tandirerung juga memaparkan faktor-faktor keberhasilan khususnya di level domestik yang mendorong Ethiopia dalam meratifikasi NBA dan CFA.

Waterbury dengan tulisannya yang berjudul “*The Nile Basin National Determinants of Collective Action*” menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sepuluh negara Nil, mulai dari ketahanan pangan, kesenjangan masyarakat hingga gejolak stabilitas politik. Waterbury dalam tulisannya juga memberikan serangkaian langkah yang mengarah pada perumusan kebijakan dan peraturan yang berwawasan lingkungan oleh negara-negara lembah Nil.

Dalam jurnal yang berjudul “*Challenges for Water Sharing in The Nile Basin: Changing geo-politics and Changing Climate*” yang ditulis oleh Swain juga memaparkan faktor-faktor domestik yang mempengaruhi tindakan negara hulu dalam menciptakan keadilan terhadap sungai Nil. Secara kritis tulisan ini mengkaji kelangsungan dan keberlanjutan upaya kerjasama air di lembah sunga Nil yang dihadapi oleh tantangan perubahan iklim global dan adanya pergeseran geopolitik regional.

Jika disimpulkan beberapa peneliti yang meneliti sengketa yang terjadi di sungai Nil dalam tulisannya berfokus pada pembahasan konflik secara umum dan pentingnya Nil sebagai sumber kehidupan bagi negara-negara aliran yang mengakibatkan lahirnya kekuatan negara hulu melawan hegemoni Mesir dan Sudan atas sungai Nil. Namun terdapat argumen yang berbeda yang disampaikan oleh M. Ibrahim dalam tulisannya yang berjudul “*The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The Beginning of the end of Egyptian Hydro-Political Hegemony*” dimana dikatakan bahwa keberhasilan negara-negara hulu terutama Ethiopia dalam melawan hegemoni Mesir tidak cukup mampu menggeser hegemoni Mesir dan Sudan terhadap sungai Nil. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh Ethiopia bersama negara-negara hulu lainnya dinilai berhasil, namun Ibrahim memandang

bahwasanya Mesir tidak akan sepenuhnya melepaskan haknya atas sungai Nil, hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan Mesir dalam upaya meratifikasi *Nile Basin Cooperative Framework Agreement*.

Pada penelitian yang akan peneliti angkat akan berfokus pada sudut pandang negara Ethiopia, yang dalam hal ini akan membahas apa saja faktor yang mendorong Ethiopia membuat kebijakan untuk membangun sebuah bendungan, kemudian bagaimana langkah ataupun proses yang dilakukan Ethiopia dalam keberhasilannya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* yang sekaligus menghapus dominasi Mesir dan Sudan terhadap sungai Nil dan secara struktural berhasil merubah konfigurasi hidropolitik di sungai Nil. Pembangunan GERD juga menjadi simbol kebangkitan negara-negara hulu dalam memberantas ketimpangan yang dialami selama bertahun-tahun, dan hal ini didukung oleh beberapa argumen dari para akademisi yang telah melakukan penelitian sebelumnya, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang keberhasilan negara-negara hulu melawan hegemoni Mesir, dalam tulisan ini selain membahas tentang keberhasilan Ethiopia juga memfokuskan penelitian pada strategi apa saja yang dilakukan Ethiopia sehingga pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) tersebut dapat terealisasi.

1.6 Kerangka Pemikiran

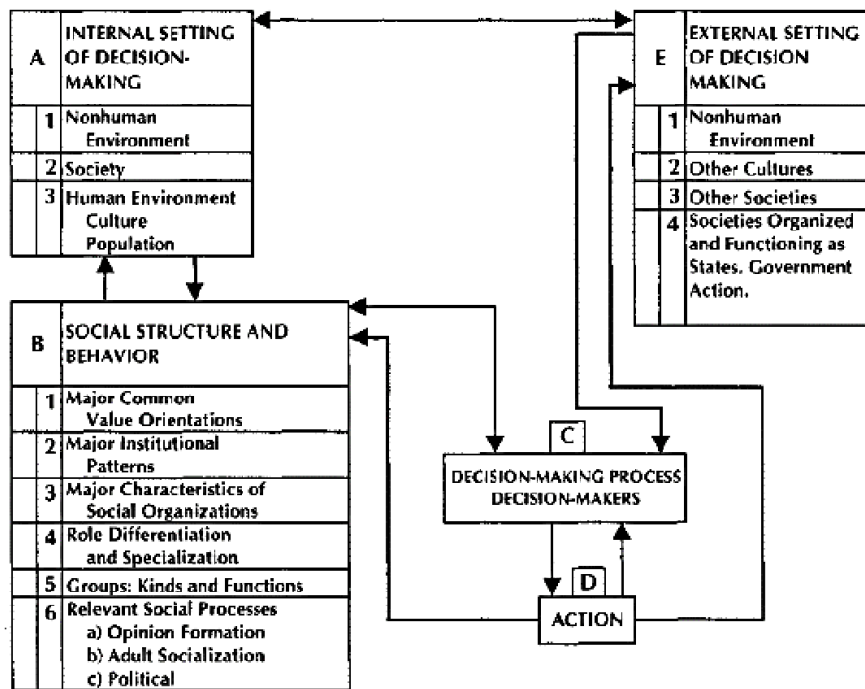
Dalam menganalisis studi kasus terkait upaya Ethiopia melalui kebijakannya dalam pembangunan bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD), penulis akan coba menjelaskan menggunakan teori Pengambilan Keputusan atau *Decision Making Theory* oleh Richard C. Snyder. Teori

Pengambilan Keputusan muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1950. Dalam proses sejarahnya, teori ini mengalami banyak perkembangan dan memiliki versi dari tokoh pencetusnya masing-masing. Salah satu pemikiran tokoh *Decision making Theory* adalah Richard Carlton Snyder.

Dalam menjawab pertanyaan terkait judul dan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori Pengambilan Keputusan dari Richard Carlton Snyder. Dimana teori *Decision making* dari Snyder ini akan membantu penulis dalam menganalisis suatu kebijakan yang diambil oleh Ethiopia dalam keputusannya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD). Teori Snyder ini, membantu peneliti dalam melihat bagaimana proses yang terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan. Di dalam teori Pengambilan Keputusan oleh Snyder, terdapat variabel analisis yang menjadi pertimbangan bagi negara dalam mengambil kebijakan luar negeri, faktor tersebut harus dilihat dari pertimbangan *Internal Setting* dan *Eksternal Setting* (Snyder and Bruck 2022).

Untuk memahami lebih lanjut terkait variabel serta indikator yang terdapat dalam *Decision Making Theory* oleh Richard C. Snyder dapat dilihat melalui mind map berikut:

Gambar 2 Skema Proses *Decision Making* (Snyder and Bruck 2022).



Snyder dalam teorinya menjelaskan bahwa variabel *Internal Setting* dan *Eksternal Setting* merupakan dua variabel penting yang tidak dapat dihilangkan dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor *Internal Setting* sendiri merupakan faktor pendorong kebijakan yang bersumber dari dalam negeri, selaras dengan namanya yakni *internal*, yang mana pada faktor internal akan mencakup indikator-indikator pendorong seperti kondisi geografi, letak geografis, opini publik, politik domestik, pengaruh organisasi pemerintah maupun non pemerintah, dan faktor-faktor yang menyangkut persoalan dalam negeri lainnya. Sedangkan *Eksternal Setting* merupakan kebalikan dari *Internal Setting*, dimana pada variabel ini akan melihat apa saja faktor luar yang mampu berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh *Decision Maker*, misalnya seperti letak batas teritorial negara, pengaruh organisasi internasional maupun regional, dan peran negara luar maupun aktor internasional. Selain variabel *Internal Setting* dan *Eksternal Setting*, terdapat juga variabel *Social Structure and Behavior*, yang merupakan variabel

yang masih memiliki kaitan erat dengan faktor *internal setting*, dimana pada variabel ini analisa akan lebih mengarah pada bagaimana keadaan sosial maupun budaya dari suatu masyarakat dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil (Snyder and Bruck 2022).

Pada penelitian ini, penulis akan mengaitkan *Decision Making Theory* oleh Richard C. Snyder dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang dijadikan Ethiopia sebagai landasan dalam kebijakannya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) melawan *status quo* Mesir dan Sudan di sungai Nil dengan menjabarkan melalui variabel *Internal Setting*, *Social Structure and Behavior* dan *Eksternal Setting* sesuai dengan masing-masing indikator yang terdapat di dalam teori. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada alasan munculnya kekuatan dari negara riparian dalam menentang hegemoni Mesir dan Sudan yang telah menguasai aliran sungai Nil selama bertahun-tahun lamanya, serta bagaimana proses yang terjadi dalam upaya negara hulu yang dalam hal ini akan berfokus pada Ethiopia sebagai negara pemimpin terkait bagaimana akhirnya Mesir dan Sudan mau menandatangani perjanjian pembangunan bendungan dan ikut dalam kerjasama GERD.

A. *Internal Setting*

Internal Setting merupakan variabel yang melihat faktor internal apa saja yang dapat digunakan oleh decision makers sebagai langkah dalam mengambil suatu kebijakan. Snyder menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator dalam variabel ini, indikator-indikator tersebut antara lain adalah *Non-Human Environment*, *Society*, dan *Human Environment*. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan

menggunakan dua indikator, indikator tersebut antara lain *Non-Human Environment* dan *Human Environment*. Kedua indikator tersebut digunakan karena merupakan indikator di dalam variabel *internal setting* yang paling relevan dalam menganalisis mengapa Ethiopia membangun bendungan GERD di Sungai Nil, dimana apabila dikaitkan dengan teori Snyder Ethiopia memiliki alasan kuat untuk membangun bendungan ditinjau dari posisi geografis Ethiopia yang berdekatan dengan Sungai Nil Biru yang berkontribusi sebanyak 85% terhadap aliran air sungai Nil yang menuju ke hilir. Kemudian pada indikator *Human Environment* juga sangat relevan dalam melihat alasan Ethiopia membangun bendungan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi dengan kebijakannya membangun bendungan meskipun harus melawan Mesir dan Sudan yang terkenal akan kekuatan militernya yang kuat. Sedangkan indikator *Society* tidak penulis gunakan karena pada studi kasus ini penulis melihat bahwa kebijakan yang diambil Ethiopia dalam membangun GERD didasari atas kebijakan PM Ethiopia pada saat itu yaitu Meles Zenawi, dimana Zenawi mengeluarkan kebijakannya atas dasar kebutuhan ekonomi dengan tidak melihat bagaimana pola kehidupan masyarakat Ethiopia dalam bersosial sebagai pertimbangan. Adapun penjelasan terkait indikator-indikator dalam variabel Internal Setting adalah sebagai berikut;

- ***Non-Human Environment***: Merupakan indikator yang mempengaruhi suatu negara dalam memutuskan kebijakan yang dilihat dari faktor internal yang berfokus pada persoalan yang bukan berasal dari manusia (*non human*), seperti kondisi geografi, letak teritorial negara, bagaimana kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Disini penulis

akan menggunakan indikator *non-human* dengan posisi dan letak negara Ethiopia terhadap sungai Nil Biru yang menjadi alasan mengapa Ethiopia membangun bendungan GERD.

- ***Society***: Merupakan indikator yang melihat bagaimana kehidupan masyarakat dalam bersosial di sebuah negara yang dijadikan faktor dalam mengambil sebuah keputusan.
- ***Human Environment***: Merupakan indikator yang mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan yang dilihat dari faktor manusia, seperti pengaruh kepentingan politik kelompok domestik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana proses kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah Ethiopia terhadap kebijakan pembangunan bendungan GERD.

B. *Social Structure and Behavior*

Social Structure and Behavior merupakan variabel pendukung dari variabel internal, dimana variabel *Social Structure and Behavior* ini akan melihat bagaimana pola dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi sebuah kebijakan suatu negara. Snyder menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat enam indikator dalam variabel *Social Structure and Behavior* yang dijadikan bahan acuan dalam menjabarkan permasalahan, indikator-indikator tersebut adalah *Major Common Value Orientation*, *Major Institutional Pattern*, *Major Characteristic of Social Organization*, *Role Differentiation and Specialization*, *Groups: Kinds and Function*, dan *Relevant Social Process*. Dalam penelitian ini, penulis akan

menggunakan dua indikator yaitu *Major Common Value Orientation* dan *Major Institutional Pattern* karena kedua indikator tersebut penulis rasa paling relevan dalam menganalisis faktor pendorong kebijakan Ethiopia dalam membangun bendungan di sungai Nil Biru. *Major Common Value Orientation* akan menjelaskan bagaimana Ethiopia sebagai negara agraris mengeluarkan kebijakan membangun bendungan sejalan dengan nilai-nilai di masyarakat Ethiopia yang bergantung pada sektor pertanian, mengingat juga sektor pertanian memberi pemasukan negara dalam jumlah yang besar. *Major Institutional Pattern* akan menganalisis bagaimana tujuan politik luar negeri yang dijadikan acuan oleh pemerintah Ethiopia dalam kebijakannya terkait proyek bendungan GERD. Sedangkan empat indikator lainnya tidak digunakan karena aspek-aspek yang terdapat dalam indikator tersebut penulis rasa tidak cukup relevan karena tidak terdapat dalam proses pengambilan kebijakan sesuai rumusan masalah dari studi kasus yang diangkat. Adapun penjelasan terkait indikator-indikator dalam variabel Social Structure and Behavior adalah sebagai berikut;

- ***Major Common Value Orientation:*** Merupakan indikator yang melihat pada bagaimana nilai-nilai dan kebutuhan yang terdapat di masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai alasan mengapa sebuah kebijakan diambil. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana nilai-nilai masyarakat Ethiopia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan GERD, serta apa dampak GERD dalam mengatasi nilai-nilai atau permasalahan sosial yang ada.

- ***Major Institutional Pattern:*** Merupakan indikator yang melihat bagaimana kepentingan politik serta pola dan prinsip dari suatu institusi dalam melahirkan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan indikator *Major Institutional Pattern* sebagai faktor analisis apa tujuan politik luar negeri yang dijadikan acuan oleh pemerintah Ethiopia dalam kebijakannya terkait proyek bendungan GERD.
- ***Major Characteristics of Social Organization:*** Merupakan indikator yang melihat bagaimana organisasi sosial yang terdapat didalam masyarakat sebuah negara.
- ***Role Differentiation and Specialization:*** Merupakan indikator yang akan melihat bagaimana adanya perbedaan peran dijadikan sebagai sebuah acuan dalam mempertikmbangkan sebuah kebijakan.
- ***Group: kinds and Function:*** Merupakan indikator yang dilihat dari bagaimana kelompok serta fungsi dari kelompok tersebut menjadi pertimbangan seorang pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan.
- ***Relevant Social Processes:*** Merupakan indikator yang melihat bagaimana proses sosial yang dinilai relevan dalam kebijakan sebelumnya dilakukan penyesuaian kembali dalam kebijakan yang hendak diperbaharui.

C. *Eksternal Setting*

Eksternal Setting merupakan faktor yang melihat bahwa sebuah kebijakan terbentuk karena dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi dari luar negara (eksternal). Variabel *Eksternal Setting* coba melihat bagaimana pengaruh negara, organisasi serta aktor internasional dapat memberikan kontribusi terhadap lahirnya suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Snyder dalam bukunya bahwa terdapat empat indikator di dalam variabel *eksternal setting*. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain adalah *Non-Human Environment, Other Culture, Other Societies, dan Societies Organized and Functioning as States and Government Action*. Namun pada bagian faktor eksternal dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar yang datang dari negara lain yang dalam hal ini adalah Tiongkok. Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup besar, dimana Tiongkok membantu Ethiopia dalam mendanai bendungan yang sedang dibangun Ethiopia melalui kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI), mengingat GERD merupakan bendungan raksasa yang membutuhkan dana pembangunan yang besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka indikator yang akan digunakan dalam menjelaskan pengaruh Tiongkok terkait kebijakan luar negeri Ethiopia membangun bendungan di Sungai Nil adalah indikator *Societies Organized and Functioning as States and Government Action*. Sementara indikator *Non-Human Environment* tidak dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Ethiopia dalam mengambil kebijakan, hal ini selaras dengan pernyataan PM Meles Zenawi yang menyatakan bahwa pembangunan GERD tidak akan dihentikan dan tetap akan dilanjutkan tidak peduli bagaimanapun situasinya. Sedangkan indikator *Other Culture* dan *Other Societies* tidak penulis gunakan karena kedua indikator ini tidak

terdapat dalam menjelaskan studi kasus. Adapun penjelasan terkait indikator-indikator dalam variabel Eksternal Setting adalah sebagai berikut;

- ***Societies Organized and Functioning as States and Government***
Action: Merupakan indikator yang menjelaskan tentang bagaimana peran negara maupun organisasi internasional dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, penulis akan melihat bagaimana pengaruh Tiongkok terhadap Ethiopia yang memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan proyek pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di sungai Nil Biru.
- ***Non-Human Environment:*** Merupakan indikator eksternal yang ditinjau dari faktor non-manusia, dimana indikator ini akan menjelaskan peran atau pengaruh dunia internasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan.
- ***Other Culture:*** Merupakan indikator yang akan melihat bagaimana adanya budaya ataupun aturan dalam peraturan internasional yang dijadikan pertimbangan dalam sebuah kebijakan.
- ***Other Society:*** Merupakan indikator yang melihat bagaimana kelompok masyarakat internasional memiliki pengaruh bagi seorang pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan.

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan pengamatan secara mendalam menggunakan data-data yang relevan sebagai sumber rujukan, penulis menemukan bahwa dalam penelitian yang hendak membahas terkait sengketa yang terjadi di Sungai Nil antara negara hulu yang dipimpin oleh Ethiopia dengan negara hulu yaitu Mesir dan Sudan ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Ethiopia dalam kebijakannya membangun bendungan. Faktor-faktor tersebut berhasil peneliti jabarkan melalui teori Pengambilan Keputusan oleh Snyder dengan menggunakan tiga variable utama yaitu *Internal Setting*, *Social Structure and Behaviour*, dan *Eksternal Setting*. Penulis dalam penelitian ini juga melihat adanya perbedaan sikap yang dilakukan oleh Mesir dan Sudan yang dalam hal ini merupakan negara hilir, yang mana semula menolak segala bentuk Kerjasama yang hendak dilakukan oleh negara-negara hulu dalam upayanya melakukan Kerjasama atas pemanfaatan Sungai Nil yang adil dan merata bagi semua negara aliran sungai.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang digunakan untuk menemukan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori pendukung, yang dijabarkan melalui data deskriptif yaitu berupa lisan dan tulisan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ethiopia dan negara-negara hulu yang mendukung pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD), serta Mesir dan Sudan sebagai pemilik *status quo* terhadap sungai Nil. Adapun objek dari penelitian ini adalah *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) yang menjadi polemik kedua negara hulu dan hilir sungai Nil.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data yang bersumber dari literatur berupa buku, jurnal dan artikel resmi yang dapat di pertanggung jawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan data-data yang disajikan dalam bentuk dokumen resmi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, proposal penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I: Bab I merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini akan menjabarkan permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian melalui penjelasan secara umum terkait studi kasus yang diangkat yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi Ethiopia dalam kebijakannya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD). Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir serta

metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam mengidentifikasi pembahasan di bab selanjutnya.

BAB II: Pada bab II akan membahas bagaimana kondisi sebelum bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) diinisiasikan dengan melihat bagaimana Mesir dan Sudan mendominasi sungai Nil selama bertahun-tahun. Selanjutnya bab ini akan membahas terkait strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Ethiopia bersama negara-negara hulu dalam upaya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) melawan kekuasaan Mesir dan Sudan atas sungai Nil.

BAB III: Pada bab III akan membahas secara lebih spesifik terkait faktor apa saja yang menyebabkan Ethiopia mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) dengan mengaitkan penjelasan studi kasus berdasarkan landasan teori, yang dalam hal ini penulis coba jabarkan melalui konsep *Decision Making Theory* oleh Richard C. Snyder.

BAB IV: Bab IV merupakan bab penutup atau kesimpulan, dimana pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang diangkat dan menyertakan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBANGUNAN *GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM* (GERD)

SEBAGAI UPAYA NEGARA HULU DALAM MEMPEROLEH

KEMERATAAN AIR DI SUNGAI NIL

Pada bab pertama telah dijelaskan secara singkat mengenai studi kasus dengan penjelasan melalui latar belakang, tujuan penelitian serta landasan teori, kemudian pada bab dua ini, penulis akan menjelaskan secara spesifik terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di aliran sungai Nil mulai dari sebelum dicanangkannya pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) hingga akhirnya Ethiopia bersama negara-negara hulu lainnya berhasil merealisasikan pembangunan bendungan tersebut. Pembahasan pada bab dua ini akan dibagi kedalam dua sub bab, dimana sub bab pertama akan membahas sejarah kekuasaan Mesir dan Sudan atas sungai Nil sebelum dibangunnya bendungan, dan di sub bab kedua akan membahas proses pembangunan bendungan sebagai bentuk perlawanan Ethiopia dan negara hulu lainnya melawan hegemoni Mesir dan Sudan. Penjelasan pada bab dua ini sekaligus menjadi literatur pengantar untuk menganalisis lebih lanjut terkait aplikasi teori pada bab tiga.

2.1 Hegemoni Mesir dan Sudan di Sungai Nil

Sungai Nil merupakan salah satu sungai yang terkenal di dunia, tidak hanya karena keindahan, luas serta panjang alirannya, namun juga karena konflik yang terdapat di dalamnya. Sungai Nil telah menjadi perebutan banyak negara bahkan sejak masa kolonial. Perebutan hak kepemilikan atas sungai Nil bukan tanpa sebab,

hal itu dilatarbelakangi oleh kemampuan yang dimiliki oleh sungai Nil yang mampu memberi kontribusi besar terhadap keberlangsungan hidup bagi negara-negara kawasan, mengingat kawasan yang dialiri sungai Nil memiliki kondisi alam yang kering dan sangat tandus. Mesir, Sudan maupun Ethiopia menyadari pentingnya keberadaan sungai Nil bagi keberlangsungan negara mereka, untuk itu negara-negara tersebut terus berupaya untuk menguasai wilayah sungai Nil. Mesir sebagai negara yang memiliki power saat itu sangat berambisi untuk menguasai sungai Nil, hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah populasi penduduk yang mengakibatkan Mesir harus memenuhi kebutuhan air di negaranya. Dengan bantuan Inggris, Ethiopia berhasil menguasai sungai Nil (Gebreluel 2014).

Inggris merupakan koloni Mesir yang berkuasa sejak tahun 1811. Letak wilayah negara Ethiopia yang menjadi penghubung tiga benua yakni, Afrika, Eropa dan Asia menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling strategis. Dengan letak wilayah yang strategis tersebut memudahkan bangsa asing untuk masuk dan menyebarkan pengaruhnya di wilayah Mesir, sehingga pada masa kolonial sistem pemerintahan, budaya hingga bidang ekonomi di Mesir banyak dipengaruhi oleh bangsa Eropa (Chekol 2018).

Sebagai koloni Mesir, Inggris ikut menaruh perhatiannya pada sungai Nil. Inggris menyadari bahwa dengan menguasai sungai akan semakin memperkuat kekuasaannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan penuh atas sungai Nil adalah dengan membuat perjanjian, dimana perjanjian tersebut menjadi dasar bagi Mesir dan Sudan dalam menguasai sungai Nil selama bertahun-tahun. Terdapat dua perjanjian yang menjadi dasar hukum bagi Mesir dalam mengklaim

status quo terhadap sungai Nil, yakni perjanjian tahun 1929 dan perjanjian tahun 1950.

Pada tahun 1929, Inggris memberikan hak veto kepada Mesir dan Sudan melalui perjanjian yang bernama Perjanjian Angola-Mesir 1929. Pemberian hak veto oleh Inggris tersebut dilatarbelakangi oleh peluang kontribusi Mesir terhadap perekonomian Inggris. Inti dari perjanjian tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepada Mesir terkait keamanan sungai Nil dari gangguan negara lain, dan pembagian alokasi air ke Mesir dan Sudan, dimana Mesir memperoleh 48 miliar m³ per tahun sementara Sudan akan menerima 4 miliar m³ per tahunnya. Berikut isi dari perjanjian Angola-Mesir 1929:

1. *That Egypt and (Anglo-Egyptian) Sudan utilises 48 and 4 billion cubic meters (BCM) of the flow per year respectively, that is, 92.3 percent for Egypt and 7.7 percent (for Sudan) of the total utilisable flow. Precedence was given to the so-called 'historic or acquired rights'*
2. *That the flow of the Nile between January 20 to July 15 (the dry season (summer) be reserved for Egypt.*
3. *That Egypt reserves the r*
4. *ight to monitor the Nile flow in the upstream countries.*
5. *That Egypt assumes the right to undertake Nile River related projects without consent of upper riparian states.*
6. *That Egypt assumes the right to veto any construction projects that would affect her interests adversely (Lumumba 2007).*

Pasca 30 tahun ditetapkannya perjanjian Angola-Mesir 1929, perjanjian ini akhirnya direvisi kembali pada tahun 1959. Revisi tersebut melahirkan perjanjian baru yang dikenal dengan Perjanjian Bilateral Mesir-Sudan 1959. Sesuai dengan namanya, perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral yang dilakukan antara Mesir dan Sudan tanpa ada campur tangan dari negara aliran sungai Nil lainnya. Perjanjian Bilateral Mesir-Sudan 1959 bertujuan untuk memperoleh pengakuan internasional

untuk pembiayaan bendungan Aswan yang sedang dibangun oleh Mesir. Selain pengakuan internasional, Mesir juga berupaya menjalin kerjasama dengan Sudan karena adanya kewajiban bagi Mesir untuk mengalokasikan pemerataan air untuk Sudan yang disyaratkan oleh bank internasional *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) (Mekonnen n.d.). Adapun isi dari perjanjian Bilateral Mesir-Sudan 1959 adalah sebagai berikut;

1. *The controversy on the quantity of average annual Nile flow was settled and agreed to be about 84 billion cubic meters measured at Aswan High Dam, in Egypt.*
2. *The agreement allowed the entire average annual flow of the Nile to be shared among the Sudan and Egypt at 18.5 and 55.5 billion cubic meters, respectively.*
3. *Annual water loss due to evaporation and other factors were agreed to be about 10 billion cubic meters. This quantity would be deducted from the Nile yield before share was assigned to Egypt and Sudan.*
4. *Sudan, in agreement with Egypt, would construct projects that would enhance the Nile flow by preventing evaporation losses in the Sudd swamps of the White Nile located in the southern Sudan. The cost and benefit of same to be divided equally between them. If claim would come from the remaining riparian countries over the Nile water resource, both the Sudan and Egypt shall, together, handle the claims.*
5. *If the claim prevails and the Nile water has to be shared with another riparian state, that allocated amount would be deducted from the Sudan's and Egypt's and allocations/shares in equal parts of Nile volume measured at Aswan.*
6. *The agreement granted Egypt the right to constructs the Aswan High Dam that can store the entire annual Nile River flow of a year.*
7. *It granted the Sudan to construct the Rosaries Dam on the Blue Nile and, to develop other irrigation and hydroelectric power generation until it fully utilizes its Nile share.*
8. *A Permanent Joint Technical Commission to be established to secure the technical cooperation between them* (Mekonnen n.d.).

Tabel 1 Alur Perjanjian Sungai Nil 1929 dan 1959 (Lumumba 2007).

Tahun	Tonggak Sejarah
--------------	------------------------

1920	Komisi Proyek Nil dibentuk, menawarkan skema alokasi untuk riparians Nil. Temuan tidak ditindaklanjuti. Century Storage Scheme diajukan, menekankan proyek-proyek hulu yang relatif kecil. Rencana dikritik oleh Mesir
1925	Komisi air baru diberi nama
1929	Studi komisi mengarah pada Perjanjian Perairan Nil antara Mesir dan Inggris, yang memiliki implikasi serius bagi Sudan
1952	Bendungan Tinggi Aswan diusulkan oleh Mesir. Janji tambahan air memerlukan kesepakatan baru
1954	Putaran pertama negosiasi antara Mesir dan Sudan berakhir secara tidak menyakinkan
1956	Sudan memperoleh kemerdekaan melalui kudeta militer yang dipimpin pro-Mesir. Mesir menjadi lebih berdamai dengan Pemerintah Sudan yang baru setelah kudeta tahun 1958
1959	Perjanjian untuk Pemanfaatan Penuh Air Sungai Nil (Perjanjian Perairan Nil) ditandatangani antara Mesir dan Sudan

2.2 Bangkitnya Negara Hulu Sebagai Upaya Perlawanan

Hak veto yang dimiliki oleh Mesir dan Sudan atas sungai Nil telah mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara negara hulu dan hilir yang dalam hal ini adalah Mesir, Sudan, dan Ethiopia. Selama bertahun-tahun Mesir dan

Sudan menguasai sungai Nil secara sepihak dengan tidak melibatkan negara-negara hulu terutama Ethiopia yang secara geografis memiliki kedekatan dengan Sungai Nil Biru, lantas kedekatan Ethiopia dengan sumber mata air Nil Biru tidak membuat Ethiopia memiliki atas kebebasan untuk mengelolah sumber air tersebut. Perjanjian 1929 dan 1959 dijadikan dasar hukum oleh Mesir dan Sudan untuk mengklaim hak milik secara penuh atas sungai Nil selama bertahun-tahun, akibatnya hubungan antara negara hulu-hilir dipenuhi dengan kecurigaan, konflik militer hingga konfrontasi politik yang terjalin selama bertahun-tahun.

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan air di kawasan Afrika setiap tahunnya telah menyadarkan negara hulu sungai Nil untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan Mesir dan Sudan. Kebangkitan negara-negara hulu dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan Mesir dan Sudan dipimpin oleh Ethiopia. Upaya Ethiopia dalam membangun bendungan datang di masa pemerintahan Perdana Menteri Meles Zenawi. Meles Zenawi yang memiliki nama asli Legesse Zenawi Asres, merupakan salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Ethiopia. Tercatat bahwa Zenawi pernah menjabat sebagai presiden Ethiopia pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Setelah empat tahun menjabat, Zenawi kemudian kembali menduduki kursi pemerintahan yakni sebagai Perdana Menteri (PM). Zenawi menjabat sebagai PM sejak tahun 1995 hingga wafat pada tahun 2012 (BBC News 2012). Jika dilihat dari segi geografis, Ethiopia dan negara-negara tepi sungai Nil berhak untuk menerima dan mengolah air dari sungai Nil untuk keperluan nasional negaranya, karena letak sungai Nil Biru yang berada tepat di wilayah Ethiopia. Untuk melawan ketidakadilan yang telah diciptakan selama bertahun-tahun tersebut, upaya demi

upaya dilakukan oleh negara hulu khususnya Ethiopia. Upaya pertama yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan sepihak Mesir dan Sudan adalah dengan melakukan hubungan multilateral antara negara-negara riparian, dimana kerjasama multilateral yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini berujung pada pembentukan *Nile Basin Initiative* (NBI) yang melahirkan *Cooperative Framework Agreement* (CFA) (Moghraby 2018).

2.2.1 Pembentukan Nile Basin Initiative (NBI)

Nile Basin Initiative (NBI) merupakan forum yang terdiri dari 10 negara riparian yakni Ethiopia, Burundi, *Democratic Republic of Congo*, Kenya, Mesir, Rwanda, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania dan Uganda serta Eritrea sebagai pengamat. NBI diresmikan pada tanggal 22 Februari 1999 melalui *Agreed Minutes on NBI*. NBI digunakan sebagai wadah dalam melakukan konsultasi serta koordinasi, bertukar dialog dan bantuan teknologi dalam upaya pengembangan berkelanjutan yang adil di aliran sungai Nil. Keberadaan NBI sendiri bukan merupakan kerangka permanen melainkan dijadikan sebagai wadah untuk membentuk kerangka kerjasama yang bersifat permanen. Adapun tujuan dari NBI adalah sebagai berikut;

1. Pengembangan air sungai Nil yang berkelanjutan yang menjamin keamanan dan perdamaian bagi anggota.
2. Memastikan pengelolaan air Nil dilakukan secara efisien dan optimal.
3. Kerjasama guna mencapai keuntungan bersama bagi negara-negara riparian.
4. Mendorong integrasi ekonomi untuk memberantas kemiskinan

5. Untuk program perpindahan perencanaan ke tindakan (*The Nile Basin Initiative Act 2022*).

2.2.2 Pembentukan Cooperative Framework Agreement (CFA)

Sejak *Nile Basin Initiative* (NBI) diresmikan pada tahun 1999, telah banyak langkah negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota dalam melancarkan tujuannya untuk pengelolaan air sungai Nil yang adil, salah satunya dengan membentuk *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA). CFA merupakan negosiasi multilateral pertama yang diinisiasikan oleh negara-negara hulu yang melibatkan negara hilir (Mesir dan Sudan). Rancangan CFA awalnya dibentuk pada tahun 1997. Kemudian di tahun 2007 konsep dari CFA disampaikan melalui *Council of Ministers of Water Affairs on the Nile Basin countries* (Nile-COM) (Tandirerung 2014). Selama proses negosiasi berlangsung terdapat banyak negosiasi yang gagal akibat dari penolakan Mesir dan Sudan untuk meratifikasi CFA, seperti salah satunya pada tahun 2009 dimana perjanjian CFA ditandatangani oleh Ethiopia, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda, sementara negara hilir yakni Mesir dan Sudan tidak mau meratifikasi perjanjian tersebut yang berujung pada kegagalan negosiasi (Bayeh 2015). Alasan Mesir dan Sudan tidak meratifikasi perjanjian CFA adalah karena terdapat pasal dalam perjanjian tersebut yang dinilai akan merugikan negara hilir, untuk itu Mesir meminta agar pasal tersebut diganti. Negara-negara hulu terus melakukan upaya dalam menjalin kerjasama bersama negara hilir. Setelah melewati proses yang panjang, pada tanggal 13 Juni 2013 naskah terbaru dari *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) akhirnya ditandatangani pertama kali oleh Ethiopia, Rwanda

pada 28 Agustus 2013, kemudian disusul oleh Tanzania pada tanggal 26 Maret 2015 (Tandirerung 2014).

Perjanjian yang tertuang dalam CFA inilah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah Ethiopia dalam kebijakannya membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di lembah sungai Nil Biru.

2.3 Respon Mesir dan Sudan Terhadap Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD)

Mesir dan Sudan merupakan negara yang memiliki kendali penuh atas sungai Nil melalui hak veto yang diperoleh dari Inggris dalam perjanjian tahun 1929 dan 1959. Perjanjian tersebut telah membuat Mesir dan Sudan berhasil menguasai sungai Nil selama puluhan tahun lamanya. Munculnya aksi protes yang dilakukan negara-negara hulu jelas akan memberikan dampak buruk bagi negara hilir terutama Mesir.

Terdapat dua perbedaan sikap yang dilakukan oleh Mesir dalam merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD). Perbedaan sikap Mesir terjadi pada masa pemerintahan Presiden Mohamed Mursi dan Presiden Abdul Fattah Al-Sisi, dimana pada era pemerintahan Mohamed Mursi Mesir menolak keras pembangunan GERD, akan tetapi terjadi perbedaan pada masa pemerintahan Al-Sisi dimana sikap Mesir lebih lunak dengan turut andil menandatangani perjanjian kerjasama bersama negara-negara hulu.

2.3.1 Mesir dibawah Pemerintahan Mohamed Mursi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Mesir menolak segala bentuk kerjasama dengan negara-negara hulu dengan tidak mau

menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama seperti yang coba dilakukan negara hulu dalam perjanjian CFA. Penolakan Mesir atas kebijakan Ethiopia membangun bendungan GERD didasari oleh kontribusi sungai Nil terhadap kebutuhan air Mesir, mengingat Mesir merupakan negara dengan kondisi wilayah yang sangat tandus dan memiliki wilayah gurun yang luas dengan curah hujan rendah, sehingga dengan adanya bendungan GERD di sungai Nil Biru akan mengurangi jumlah air yang masuk ke bendungan Aswan yang ada di Mesir, yang mana kondisi tersebut akan berdampak buruk pada sektor pertanian, pariwisata, krisis listrik dan sektor-sektor penunjang ekonomi lainnya (Brooke 2014).

Mesir melakukan berbagai upaya agar bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) tidak berhasil, salah satunya dengan mengadakan kampanye penolakan pembangunan bendungan bersama negara-negara yang berdampak di lembah sungai Nil. Mesir juga mengajak komunitas internasional agar ikut menyuarakan penolakan pembangunan GERD (Aman 2016).

Dalam upayanya menjaga keamanan air, Mesir juga melakukan pertemuan dengan banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan GERD. Pada tahun 2014 Mesir yang diwakili oleh Menteri Perairan dan Irigasi melakukan pertemuan dengan perusahaan konstruksi asal Italia untuk membatalkan keterlibatannya dalam membantu Ethiopia membangun GERD, dimana dalam pertemuan tersebut Mesir berhasil meraih simpati perusahaan Italia tersebut. Mesir juga melakukan pertemuan bersama Belanda, Norwegia, Perancis dan Swedia. Selain kunjungan negara, Mesir juga menghubungi *World Bank* dan *The African Development Bank* (AfDB) untuk tidak mendanai pembangunan GERD yang hendak dilakukan Ethiopia (Aman 2016).

Selain menarik perhatian internasional, Mesir juga bertindak menggunakan kekuatan militernya. Mesir melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Ethiopia yang tinggal di Mesir seperti suku Oromo. Mesir melakukan beberapa tindakan terhadap orang-orang Ethiopia yang ada di negaranya seperti melakukan serangan fisik, pengusiran, tidak memberikan fasilitas kesehatan, dan melakukan tindakan diskriminasi. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah wujud dari penolakan Mesir terhadap kebijakan Ethiopia terhadap pembangunan GERD (Schwartzstein 2013).

2.3.2 Mesir dibawah Pemerintahan Abdul Fattah Al-Sisi

Mesir di bawah pemerintahan Presiden Al-Sisi mengalami perbedaan yang sangat mencolok, dimana sikap Mesir yang semula menolak melakukan kerjasama dengan negara hulu akhirnya turut terlibat dalam kerjasama pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD).

Mesir resmi menjadi bagian dalam kerjasama Ethiopia melalui *Declaration of Principle* (DoP) yang ditandatangani Mesir pada tanggal 23 Maret 2015. DoP merupakan deklarasi yang berisi tentang pengaturan pembangunan negara-negara aliran sungai Nil (NN 2015). DoP berisi 10 prinsip, 10 prinsip tersebut adalah *Principle of Development, Regional Integration, Sustainability, Principle Equitable and Reasonable Utilization, Principle to Cooperate on the First Filling and Operation of the Dam, Principle of Confidence Building, Principle of Exchange of Information and Data, Principle of Dam Safety, Principle of Sovereignty and Territorial Integrity*, dan *Principle of Peaceful Settlement of Disputes*. Adapun inti dari 10 prinsip tersebut adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan kerjasama antar negara dengan berlandaskan kepercayaan satu sama lain guna meraih keuntungan bersama (NN 2015, 5-6)

2.3.3 Respon Sudan terhadap Pembangunan Bendungan

Sudan merupakan negara yang turut menikmati sungai Nil berdasarkan historical rights yang telah diatur dalam perjanjian tahun 1992 dan perjanjian tahun 1995 bersama Mesir. Sama seperti Mesir, dimana Sudan menolak segala bentuk kerjasama yang hendak dilakukan oleh Ethiopia bersama negara hulu lainnya. Namun terjadi perbedaan sikap antara Mesir dan Sudan, dimana dalam kerjasama multilateral yang dilakukan negara hulu bersama hilir melalui kerjasama CFA, akhirnya ditandatangani terlebih dahulu oleh Sudan. Pada bulan Maret tahun 2012 Ethiopia yang diwakili oleh Menteri Sumber Daya Air melakukan pertemuan bersama Mesir dan Sudan. Pertemuan tersebut berhasil menarik perhatian Sudan, dimana Sudan di bawah pemerintahan Presiden Omar Bashir akhirnya resmi mendukung kerjasama dalam pembangunan bendungan. Keberpihakan Sudan dilakukan dengan alasan keuntungan yang akan diperoleh Sudan jauh lebih besar daripada terus mempertahankan perjanjian 1929 dan 1959 yang dibuat bersama dengan Mesir, mengingat Sudan merupakan negara yang berdekatan dengan Sungai Nil Putih (Yihdego 2017).

BAB III

UPAYA ETHIOPIA MEMBANGUN *GRAND ETHIOPIAN*

RENAISSANCE DAM (GERD) DILIHAT DARI PERSPEKTIF

DECISION MAKING THEORY OLEH SNYDER

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana ketegangan yang muncul di aliran sungai Nil serta proses pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) yang dilakukan oleh Ethiopia sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan air yang menjadi awal mula perselisihan antara Ethiopia dan Mesir. Pada bab tiga ini penulis akan membahas secara lebih spesifik terkait faktor pembangunan GERD yang dilakukan Ethiopia dengan menganalisis studi kasus yang diangkat menggunakan teori pembuatan kebijakan atau *decision making theory* oleh Richard C. Snyder. Snyder menjelaskan bahwa dalam perumusan suatu kebijakan terdapat beberapa variabel faktor, disini penulis akan menjelaskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Ethiopia dalam pembangunan GERD sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan volumetrik air dengan menggunakan tiga variabel *decision making* dari Snyder yaitu *internal setting*, *social structure and behavior* dan *eksternal setting*.

3.1 Faktor Internal Setting

Dalam mengambil sebuah kebijakan terdapat faktor-faktor penting yang harus diperhatikan tak terkecuali dalam menganalisis studi kasus menggunakan teori *decision making*. Terdapat beberapa faktor penting dalam teori *decision making* khususnya pemikiran dari Richard C. Snyder yang salah satunya adalah

faktor *Internal Setting*. Dalam faktor *internal setting* dijelaskan bahwa sebuah keputusan yang diambil oleh aktor internasional dilakukan dengan pemikiran yang matang dengan melihat beberapa aspek internal atau faktor domestik seperti, faktor geografis, kondisi perekonomian, struktur sosial dan masyarakat dan persoalan lainnya yang berhubungan erat dengan persoalan dalam negeri. Untuk menjabarkan faktor internal dari studi kasus, penulis akan menggunakan dua indikator dari variabel faktor *internal setting* yakni indikator *non human environment* dan indikator *human environment*. Dua indikator tersebut penulis digunakan karena dirasa sudah sangat sesuai dengan fokus pembahasan yang diangkat, dimana indikator *non human environment* akan menjawab mengapa Ethiopia membangun bendungan GERD ditinjau dari kondisi geografis negaranya terhadap sungai Nil Biru, kemudian pada indikator *human environment* akan menjawab alasan Ethiopia dengan kebijakannya ditinjau dari faktor manusia, dimana kedua indikator tersebut sudah sangat menjawab rumusan masalah terkait alasan Ethiopia dengan kebijakannya membangun bendungan dilihat dari faktor internal.

3.1.1 Non Human Environment: Posisi Geografis Ethiopia terhadap Sungai Nil Biru

Pada indikator faktor non-manusia ini pembahasan akan melihat pada posisi geografis Ethiopia sebagai salah satu faktor kunci pembangunan GERD. Ethiopia merupakan negara yang terletak di benua Afrika yang memiliki wilayah seluas 1.127.127 kilometer persegi. Di bagian utara Ethiopia berbatasan dengan Eritrea, berbatasan dengan Somalia dan Djibouti di bagian timur, bagian selatan berbatasan

dengan Kenya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sudan dan Sudan Selatan (Kemlu RI 2018).

Sungai Nil memiliki peran yang sangat besar khususnya di sektor ekonomi bagi negara-negara wilayah aliran yang secara umum perairan sungai Nil digunakan untuk memproduksi listrik tenaga air, untuk keperluan irigasi, jalur transportasi air, sumber pasokan air, dan memberikan pengaruh di sektor pariwisata. Sumber ekonomi negara-negara di wilayah aliran sungai Nil didominasi oleh pertanian, yang artinya keberadaan sungai Nil menjadi sumber pendukung kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, namun nyatanya keberadaan sungai Nil tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh banyak negara seperti salah satunya Ethiopia sebagai negara hulu sungai Nil akibat dari adanya *status quo* Mesir dan Sudan atas aliran sungai Nil melalui Perjanjian 1959 (Owiro 2004).

Pembangunan bendungan GERD di sungai Nil yang dilakukan Ethiopia bersama negara hulu lainnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi khususnya bagi Ethiopia seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, namun alasan kuat lainnya mengapa Ethiopia menginisiasikan pembangunan GERD dan berani menentang *status quo* Mesir dan Sudan terhadap aliran sungai Nil adalah ditinjau dari posisi geografis atau letak wilayah Ethiopia sebagai wilayah utama dari sungai Nil Biru. Aliran Sungai Nil terbentuk dari dua anak sungai yaitu sungai Nil Putih yang berasal dari wilayah Danau Victoria yang menyumbang sebanyak 15% dan sungai Nil Biru dari wilayah Danau Tana di Ethiopia yang menyumbang sebanyak 85% air ke aliran utama sungai Nil (Ustman 2019).

Tingginya persentase air dari Danau Tana yang masuk ke aliran sungai Nil utama membuat negara-negara hulu khususnya Ethiopia menjadi geram akibat dari

penggunaan air yang tidak adil yang hanya menguntungkan Mesir dan Sudan, padahal jika ditarik dari letak geografis, sungai Nil Biru seharusnya dapat dimanfaatkan bersama oleh negara-negara aliran tidak hanya untuk Mesir dan Sudan saja. Dengan permasalahan internal yang terjadi dan dibarengi oleh sikap geram Ethiopia dan negara hulu lainnya atas sikap Mesir dan Sudan, akhirnya Ethiopia menginisiasikan pembangunan bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* pada tahun 2011 yang mana bendungan raksasa ini mampu menampung air dua kali lipat lebih besar dari kapasitas Danau Tana yang mengairi hutan di barat laut Ethiopia yang memiliki luas 1.680 kilometer persegi. Pasca beroperasi, GERD diprediksikan akan mampu memproduksi listrik sebesar 6.000 megawatt yang mana jumlah tersebut melebihi kebutuhan listrik nasional di Ethiopia (Asiedu 2018).

3.1.2 Human Environment: Kepentingan Domestik Ethiopia Sebagai Sebuah Kebijakan

Hak istimewa Mesir dan Sudan atas sungai Nil menjadikan perekonomian negaranya unggul, tercatat bahwa di sektor militer dan ekonomi Mesir menjadi negara dengan peringkat dua belas dunia dan peringkat satu tertinggi di Afrika. Keberhasilan Mesir di sektor ekonomi adalah dampak dari besarnya pengaruh sungai Nil. Kontribusi sungai Nil dalam menyongsong ekonomi juga menjadi alasan mengapa Mesir dan Sudan sangat menjaga kekuasaannya terhadap aliran sungai Nil. Ketidakmerataan dan pengelolaan air sepihak yang dilakukan Mesir dan Sudan terhadap sungai Nil dalam mengklaim hak yang dimilikinya melalui *status quo* yang diperoleh dalam perjanjian 1929 dan 1959 telah menyebabkan ketidakharmonisan negara hilir dengan negara hulu (Abawari 2011).

Ethiopia merupakan negara dengan jumlah populasi tinggi, dimana jumlah penduduk di Ethiopia mencapai 109.160.265 juta jiwa yang menjadikannya sebagai negara ke-27 terbesar di dunia dan sekaligus negara kedua di Afrika dengan jumlah populasi penduduk terbesar setelah Nigeria. Luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk Ethiopia ternyata tidak sebanding dengan kondisi perekonomiannya. Ethiopia menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Afrika dengan jumlah *Gross National Income* (GNI) hanya mencapai 971 dolar. Kemiskinan di Ethiopia ini kemudian diperparah dengan kondisi geografi wilayah yang tandus dan mengalami kekeringan dalam jangka waktu panjang akibat dari kurangnya pasokan air dan keterbatasan finansial. Ethiopia merupakan salah satu negara di kawasan Afrika yang memiliki kondisi iklim yang bervariasi. Tingkat curah hujan di Ethiopia setiap bulannya adalah 13.7 mm pada bulan Januari (terendah) dan 142.2 mm pada bulan Agustus (tertinggi). Kondisi curah hujan yang tidak ditambah kurangnya fasilitas penyimpanan air mengakibatkan krisis air dan tidak menentunya kebutuhan air di Ethiopia (Tandirerung 2014).

Krisis ekonomi 2008 tidak hanya berdampak di Amerika Serikat (AS) dan Eropa namun seluruh dunia tidak terkecuali Ethiopia. Stabilitas ekonomi sejak tahun 2004 dengan pertumbuhan di angka 10% per tahun membawa Ethiopia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Namun, krisis ekonomi memaksa Ethiopia untuk mencari alternatif baru agar dapat meningkatkan kembali pertumbuhannya (Ethiopia Economic Growth 1981-2023 n.d.). Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil tampaknya tidak dapat menghindarkan Ethiopia dari kebijakan yang cukup represif. Dari laporan *Human Right Watch* di tahun 2011, ratusan masyarakat yang berasal dari latar belakang

yang berbeda-beda ditangkap dan disiksa tanpa peradilan atas dasar membahayakan stabilitas nasional (pembangkang). Bahkan, jumlah ini bisa melebihi perkiraan di awal karena sulitnya media untuk melakukan liputan (Roth 2010). Kemudian, di tahun 2009 dan 2010, pemerintah secara terbuka melakukan pembatasan atas kebebasan berpendapat melalui sensor atas informasi yang begitu masif. Argumen ini kemudian diperkuat oleh laporan oleh Peter Bosshard, direktur kebijakan International Rivers, salah satu kelompok yang secara tegas menentang pembangunan bendungan mengatakan,

“Anggota masyarakat yang terkena dampak tidak diajak berkonsultasi; siapapun bahkan dicurigai menentang bendungan berisiko menderita konsekuensi serius. Pemerintah yang akuntabel dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan merupakan elemen kunci pembangunan sosial dan ekonomi. "Pemerintah Ethiopia mengolok-olok konsep ini. Di bendungan Gibe III, proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Ethiopia, setiap partisipasi orang yang terkena dampak telah ditekan, dan setiap pembangkang berisiko ditangkap atau lebih buruk lagi (Moszynski 2011).

Kritik dari berbagai pihak tidak menyurutkan niat Perdana Menteri Meles Zenawi untuk melanjutkan pembangunan bendungan, bahkan pembangunan ini berjalan cukup lancar. Pada pidato peresmian proyek Bendungan Renaissance, Perdana Menteri Meles Zenawi mengatakan bahwa,

"Mereka tidak mau lihat Afrika maju; mereka ingin kita tetap tidak berkembang dan terbelakang untuk melayani turis mereka sebagai museum. Orang-orang ini berbicara tentang bahaya membangun bendungan setelah mereka menyelesaikan pembangunan bendungan di negara mereka. Dan, setelah berabad-abad ambisi dan perencanaan aktif sejak Kaisar Hailesilasie, waktunya telah tiba bagi Ethiopia untuk menunjukkan kemampuannya membangun bendungan terbesar di benua yang dibayar sepenuhnya. Namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan dan sama sekali mengabaikan keprihatinan negara-negara hilir dan dampak yang akan ditimbulkannya terhadap mereka.” (Moszynski 2011).

Pidato ini menyiratkan bahwa, ada harapan besar bahwa proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa harus mengorbankan pihak lain. Bukan tanpa alasan, Ethiopia sebagai negara hulu secara geopolitik memiliki kendali yang besar atas sungai Nil. Banyak pihak melihat ini akan mengarahkan pada eskalasi geopolitik. Di level parlemen, Perdana Menteri Meles Zenawi tidak mendapatkan pertentangan yang berarti, bahkan dukungan mengalir cukup deras untuk mempercepat proyek bendungan ini.

Secara sekilas pembangunan Bendungan Renaissance ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal yang berbeda justru terjadi. Presiden Isaias Afewerki dalam wawancara Januari 2016 dengan jurnalis lokal yang disiarkan di Eri-TV memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait dengan pembangunan Bendungan Renaissance. Keputusan Perdana Menteri Meles Zenawi untuk membangun Bendungan Renaissance didasarkan pada sentimen politik, perlakuan yang tidak mengenakan dilakukan oleh pihak Mesir kepada Meles di acara konferensi OAU di Kairo tahun 1993. Meles sebagai delegasi dari Ethiopia mencoba mendiskusikan terkait dengan masalah Nil Biru dan langsung ditentang oleh pihak Mesir. Penolakan dan hinaan ini melecet Meles untuk membalaskan dendam kepada Mesir, bahwa di masa depan Mesir akan bertekuk lutut seperti yang dilakukan oleh Turki kepada Iran dan Suriah. Kemudian Isaias menambahkan bahwa, proyek ini tidak melalui studi jangka panjang yang membuatnya berada pada posisi yang rentan (Kidane 2016).

Perlu diketahui bahwa, di tahun 1956-1964 pemerintah AS melalui Biro Reklamasi telah melakukan survei di sungai Nil Biru terkait pembangunan bendungan GERD di masa depan. Kemudian, di tahun 2009 hingga 2010,

pemerintah Ethiopia melakukan survei kembali di dua lokasi berbeda. Namun, pemerintah Ethiopia merahasiakan hasil survei dan desain bendungan dengan alasan yang tidak disebutkan sampai satu bulan sebelum pembangunan.

3.2 Social Structure and Behavior

Social structure and behavior merupakan variabel kedua yang terdapat dalam teori *Decision Making* dari pemikiran Richard C. Snyder. Variabel ini masih berkaitan dengan variabel *internal setting* dimana didalam variabel *social structure and behavior* ini akan menjelaskan seperti apa struktur sosial yang ada di masyarakat dan bagaimana perilaku dari masyarakat dapat menjadi faktor dalam pengambilan kebijakan. Terdapat enam indikator dalam variabel *social structure and behavior* yang dijelaskan oleh Snyder, namun penulis hanya akan menggunakan dua indikator yaitu *major common orientation value* dan *major institutional pattern*. Penggunaan dua indikator tersebut penulis rasa sesuai dalam menjawab rumusan masalah dari studi kasus, dimana indikator *major common orientation value* akan menjawab bagaimana kondisi masyarakat di Ethiopia serta dampak bendungan GERD bagi masyarakat Ethiopia, kemudian pada indikator *major institutional pattern* akan menjawab alasan Ethiopia membangun bendungan dilihat dari sudut pandang kebijakan luar negeri.

3.2.1 Major Common Orientation Value: Dampak Proyek Pembangunan GERD bagi Masyarakat Ethiopia

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kebijakan Ethiopia dalam melakukan pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* dilatarbelakangi oleh faktor utama yakni persoalan ekonomi, dimana Ethiopia

hendak mengupayakan solusi terbaik dari permasalahan yang dialami negaranya terkait keterbatasan air di tengah populasi masyarakat yang setiap tahunnya semakin meningkat. Negara-negara di kawasan Afrika khususnya negara yang dialiri sungai Nil mayoritas penyumbang perekonomiannya berasal dari pertanian. Maka dari itu, pengelolaan atas air menjadi faktor utama dalam mendorong produktivitas pertanian yang pada akhirnya mengarahkan pada peningkatan perekonomian. Ethiopia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Tercatat PDB Ethiopia di tahun 2012 mencapai 46,2% dengan menyumbang penyerapan tenaga kerja sebanyak 80%. Disusul pada tahun 2013 jumlah PDB Ethiopia adalah 34,12% di sektor pertanian, 22,9% di sektor industri, dan sebanyak 36,92% untuk sektor jasa (Kemlu RI, 2018). Selain untuk keperluan pertanian, negara-negara di kawasan Afrika yang dialiri sungai Nil menggunakan aliran sungai untuk keperluan irigasi, pengembangan listrik, jalur pariwisata dan menjadi jalur transportasi air, sehingga dapat dilihat bagaimana air dari sungai Nil dapat memberikan manfaat yang besar terhadap negara-negara aliran (Owiro 2004).

Tingginya pertumbuhan penduduk di Ethiopia menjadikan negara ini sangat fokus untuk meningkatkan infrastruktur yang lebih mumpuni, agar jumlah penduduk yang tinggi dapat diimbangi dengan kebutuhan manusia di dalamnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah yang dinilai dapat menjadi peluang bagi Ethiopia untuk memperbaiki infrastruktur di bidang ekonomi negaranya adalah dengan memanfaatkan keberadaan sungai Nil untuk memenuhi kebutuhan perekonomian khususnya di bidang pertanian (Stewart 2013). Pembangunan GERD jelas akan memberikan dampak positif bagi Ethiopia seperti

yang diterangkan oleh Sadoff dan Grey bahwa terdapat dua jenis keuntungan dari diratifikasinya perjanjian CFA yakni *benefits from river* dan *benefits beyond the river*. *Benefits from river* adalah bentuk dari keuntungan ekonomi sedangkan *benefits beyond the river* merupakan keuntungan dalam bentuk perolehan sekutu yang akan membantu Ethiopia dalam menekan pengaruh Mesir dan Sudan agar mau meratifikasi pembangunan GERD dan negara-negara sekutu tersebut akan terlibat dalam pendanaan proyek GERD yang mana akan mengurangi biaya dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Ethiopia (Tandirerung 2014).

Kemudian, pembangunan GERD bukan hanya sebagai pendorong ekonomi. Terdapat dimensi lain yakni sebagai upaya untuk mendorong kebutuhan listrik bagi masyarakat Ethiopia. Sampai dengan tahun 2022, melalui laporan Bank Dunia dua pertiga masyarakat Ethiopia yang berjumlah 65 juta jiwa belum menikmati aliran listrik (World Bank n.d.). Maka dari itu, diharapkan saat beroperasi secara penuh, bendungan ini diperkirakan akan mendatangkan 6.000 megawatt listrik yang akan mencukupi kebutuhan 65 juta masyarakat Ethiopia, dan menempatkannya sebagai bendungan terbesar di Afrika. Data ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Abiy Ahmed pada peresmian fase pertama proyek GERD tahun 2022,

"Kepentingan utama Ethiopia adalah untuk membawa cahaya bagi 60 persen penduduk yang menderita dalam kegelapan, untuk menyelamatkan tenaga kerja ibu kami yang membawa kayu di punggung mereka untuk mendapatkan energi" (Reditya 2021).

Abiy Ahmed mencoba menegaskan bahwa pembangunan bendungan GERD murni sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Ethiopia, walaupun di sisi lain ini merupakan sebuah ancaman bagi Mesir dan Sudan.

3.2.2 Major Institutional Pattern: Prinsip Kebijakan Luar Negeri Ethiopia Terhadap Pembangunan GERD

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ethiopia merupakan negara dengan penyumbang PDB terbesarnya adalah dari produk pertanian dan industri. Ethiopia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang tinggi menyadari betapa pentingnya ketersediaan air demi keberlangsungan hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Ethiopia yang merupakan negara miskin banyak mengalami persoalan internal, seperti kelaparan, kekeringan, kemiskinan, perubahan iklim, terjadinya cuaca ekstrim dan permasalahan lainnya yang menimbulkan konflik terkait sumber daya air (U.S. Department of Energy 2014).

Meningkatnya jumlah penduduk dan semakin tingginya kebutuhan air yang harus dipenuhi menjadikan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Ethiopia dalam upayanya menyongsong percepatan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain GERD menjadi langkah preventif yang diambil Ethiopia dan menjadikan sektor infrastruktur sebagai fokus basis ekonominya.

Pembangunan bendungan menjadi pilihan Ethiopia. Karena semakin cepatnya pertumbuhan penduduk, selaras dengan meningkatnya kebutuhan manusia di dalamnya. Dalam sejarah pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD), Ethiopia telah banyak melakukan upaya demi keberlangsungan proyek guna mempercepat pemerataan air di kawasan sungai Nil, namun dalam prosesnya Mesir selalu menolak segala bentuk kerjasama yang coba dilakukan Ethiopia bersama negara hulu lainnya. Mesir sangat geram dengan kebijakan

Ethiopia yang ingin membangun bendungan di sungai Nil Biru, yang mana Nil Biru menjadi pemasok air sebanyak 85% terhadap aliran sungai Nil. Mesir khawatir GERD akan mengganggu jumlah air yang akan masuk ke wilayahnya. Perlawanan Mesir tidak dapat dipungkiri, pada awal tahun 1990-an dibawah pemerintahan Presiden Sadat Mesir sempat mengancam akan melakukan perlawanan (perang) terhadap Ethiopia. Mesir juga menghambat proses pembangunan bendungan dengan melakukan pemblokiran bantuan keuangan dari *African Development Bank* (AfDB) yang akan mendanai proyek GERD (RHMIRO 2006).

Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi menyampaikan dengan tegas bahwa seluruh kebijakan yang dibuat Ethiopia adalah untuk menjaga keamanan negaranya. Ethiopia tidak akan membiarkan Mesir dan Sudan terus menerus menikmati air dari sungai Nil secara sepihak seperti yang telah dilakukan selama bertahun-tahun melalui klaim *status quo* yang diperoleh dari kolonialisme Inggris pada perjanjian 1929 dan 1959. Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) disambut baik oleh masyarakat Ethiopia. Pemerintah mengharapkan masyarakat Ethiopia turut mendukung pembangunan GERD dengan memberikan sumbangan untuk menunjang keberhasilan pembangunan bendungan raksasa tersebut (Berhane 2011).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua dimana rancangan pembangunan GERD yang diinovasikan Ethiopia dengan negara riparian melalui perjanjian CFA semula tidak disetujui oleh Mesir dan Sudan. Namun Ethiopia tidak tinggal diam. Pada bulan Maret 2012, Ethiopia mengadakan pertemuan yang diadakan bersama Mesir dan Sudan. Melalui pertemuan tersebut Sudan yang saat itu dipimpin oleh presiden Omar Bashir merubah kebijakannya dengan ikut serta menyetujui dan

mendukung pembangunan bendungan. Ethiopia bersama Mesir dan Sudan membentuk *International Panel of Experts* (IPoE) guna meninjau kembali dokumen terkait desain dan ukuran bendungan yang telah dibuat, dimana IpoE terdiri dari 10 anggota panel (terdiri dari dua perwakilan masing-masing negara dan empat anggota bidang sumber daya air dan hidrologi, sosial ekonomi, lingkungan dan teknik bendungan) (Woldeyohannes 2017). Meskipun Sudan telah berpihak dengan Ethiopia yang ditandai dengan dibentuknya IpoE, namun tidak dengan Mesir yang masih bersikeras untuk menunda pembangunan GERD. Pada tahun 2015 terjadi perubahan sikap oleh Mesir, dimana Mesir akhirnya turut menandatangani *Declaration of Principles* (DoP) yang berisikan 10 prinsip proyek GERD bersama Ethiopia dan Sudan, dimana ketiga negara tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan GERD dengan menjunjung rasa kepercayaan satu sama lain (State Information Service Egypt 2018).

3.3 Faktor *Eksternal Setting*

Faktor *eksternal setting* merupakan faktor yang berasal dari luar negeri yang mendorong aktor pembuat keputusan dalam mengambil dan membuat suatu kebijakan. Salah satu faktor mengapa suatu keputusan diambil adalah karena timbulnya rasa ketidakadilan dari pihak eksternal yang berujung pada tindakan berupa sebuah kebijakan guna menjaga kepentingan nasional. Umumnya keputusan yang dibuat oleh *decision makers* didasari oleh dukungan dari pihak atau negara lain (dukungan eksternal) yang akan memperkuat para *decision makers* dalam mengambil sebuah kebijakan. Snyder menjelaskan bahwa didalam faktor eksternal setting terdapat empat indikator, namun disini penulis hanya akan menggunakan

dua indikator, yaitu *Non human environment* dan *societies organized and functioning as states and government action* dalam menjelaskan faktor eksternal dari kebijakan Ethiopia dalam pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD).

3.3.1 Societies Organized and Functioning as States and Government Action: Dukungan Tiongkok

Peresmian pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi pada tanggal 13 Maret 2011. Perdana Menteri Meles Zenawi kemudian menjelaskan manfaat dari bendungan Ethiopia (GERD) melalui pidato yang disampaikan pada tanggal 02 April 2011 yang sekaligus menjadi momentum peletakan batu pertama, adapun isi dari pidato Meles Zenawi adalah sebagai berikut:

“Before we mobilized our efforts to eradicate poverty, centuries of impoverishment curtailed our development and restricted us from exercising our right to use the resources of our own rivers. Now, thanks to the dedication of our peoples, we have safely put those times behind us. We are close to opening a new chapter through the realization of our Millennium project. Henceforward, nothing can stop us from exercising our rights; the other dams we plan to build are less challenging than this, the Millennium Dam (Samaan 2014).”

GERD merupakan bendungan terbesar di kawasan Afrika. Perdana Menteri Ethiopia menyampaikan bahwa proyek GERD setidaknya memerlukan biaya sebesar 3,3 miliar EURO atau setara dengan 4,78 miliar USD (Samaan, 2014). Besarnya biaya pembangunan sempat menjadi dilema bagi Ethiopia, mengingat kondisi politik dan ekonomi negara yang sangat lemah. Kondisi tersebut diperburuk oleh keberpihakan *World Bank* terhadap Mesir. *World Bank* telah menjadi mitra investasi dan mendanai banyak aktivitas dan proyek yang dilakukan oleh Mesir

terhadap sungai Nil. Besarnya pengaruh *World Bank* terhadap Mesir membuat Ethiopia mengalami hambatan dalam mencari investor yang akan membantu proses pendanaan proyek pembangunan GERD, pasalnya *World Bank* tidak mau berinvestasi dalam proyek hydro-hulu di sungai Nil (Rosberg 2014).

Minimnya bantuan *World Bank* atas pembangunan GERD tidak melemahkan tekad Ethiopia. Akhirnya pada awal tahun 2000-an pengaruh Tiongkok mulai masuk. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai memberikan perhatiannya terhadap proyek hydro-hulu dengan turut andil dalam mendanai serta melakukan investasi terhadap proyek pembangunan GERD. Masuknya pengaruh Tiongkok mampu meringankan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan Ethiopia, dan sekaligus mengurangi ketergantungan Ethiopia terhadap Mesir. Pengaruh Tiongkok juga telah berkontribusi terhadap pengurangan dampak *veto de facto* Mesir oleh *World Bank* (Rosberg 2014).

Ethiopia tergabung dalam kerjasama bersama Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Kerjasama energi di bawah *Belt and Road Initiative* (BRI) telah memungkinkan Ethiopia, yang kaya akan cadangan energi terbarukan, untuk menyelesaikan jalur transmisi listrik yang menghubungkan Djibouti dan Sudan, membuka jalan bagi konektivitas listrik regional selain ekspor, kerja sama energi, dan pembangunan bersama. Dikenal sebagai mesin ekonomi Afrika dan menekankan pergeseran menuju sumber energi terbarukan selama beberapa tahun terakhir, Ethiopia telah meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok dalam melaksanakan proyek-proyek besar, termasuk membangun saluran transmisi listrik tegangan tinggi ke bendungan air 6.450 megawatt yang saat ini sedang dibangun di Blue Nile. Adapun proyek yang dilakukan Ethiopia dengan China dalam

kerjasamanya adalah Proyek Adama. Proyek Adama adalah proyek konstruksi pengadaan rekayasa tenaga angin luar negeri pertama Tiongkok dan proyek energi baru pertama di luar negeri yang didukung oleh pinjaman lunak pemerintah Tiongkok. Terdapat dua proyek yang dilakukan, proyek kincir angin Adama I 51 megawatt dan Adama II 153 megawatt dan proyek pembangkit listrik tenaga air Tekeze 300 megawatt.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sungai Nil telah lama menjadi incaran bagi banyak negara-negara aliran, bukan tanpa alasan pasalnya sungai Nil merupakan salah satu sungai dengan aliran terpanjang di dunia yang memiliki kapasitas air yang mampu mengairi negara hulu hingga negara hilir. Besarnya kekuatan sungai Nil nyatanya tidak berkontribusi terhadap pemerataan dan krisis air di kawasan Afrika, hal tersebut dikarenakan adanya hak istimewa yang dimiliki Mesir dan Sudan untuk secara penuh mengolah air dari sungai Nil yang diberikan Inggris melalui perjanjian tahun 1929 dan perjanjian tahun 1959.

Penelitian terkait sengketa bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) dari sudut pandang Ethiopia yang peneliti jabarkan melalui teori *Decision Making* oleh Richard C. Snyder berhasil memberikan kesimpulan bahwa alasan Ethiopia mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan GERD tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor ekonomi. Jika disimpulkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong Ethiopia bersikeras melancarkan aksinya, faktor-faktor tersebut dijabarkan melalui variabel *Internal Setting, Social Structure and Behavior* serta faktor *Eksternal Setting* sesuai dengan penjabaran teori *decision making*.

Pada variabel *Internal Setting* Ethiopia mengeluarkan kebijakan untuk membangun bendungan atas dasar kepentingan ekonomi. Ethiopia merupakan salah satu negara termiskin di kawasan Afrika dengan sumber pemasukan terbesarnya adalah dari sektor pertanian. Kondisi Ethiopia yang sangat gersang dan mengalami

krisis air semakin memperparah kondisi ekonomi negaranya. Tingginya kebutuhan air untuk menunjang sektor perekonomian mendorong Ethiopia untuk mengambil kebijakan membangun sebuah bendungan raksasa yang diberi nama *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD). Kebijakan Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi untuk membangun bendungan disambut baik oleh masyarakat Ethiopia, karena GERD mampu berkontribusi terhadap sektor ekonomi seperti pertanian, pariwisata dan mampu memberi lapangan pekerjaan, selain itu GERD juga mampu menghasilkan listrik yang akan sangat berguna dalam pemerataan listrik di Ethiopia. Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan Ethiopia untuk membangun bendungan GERD ditambah dengan keberpihakan *World Bank* terhadap Mesir semakin memperkeruh keadaan, namun kondisi tersebut diringankan dengan kehadiran Tiongkok yang ikut berinvestasi melalui kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dalam hal ini telah dijelaskan melalui variabel *Eksternal Setting*.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis angkat dengan judul “*Analisis Kebijakan Ethiopia Dalam Upaya Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam Melawan Dominasi Mesir dan Sudan di Sungai Nil Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Meles Zenawi*” yang telah penulis jabarkan dalam bab satu sampai dengan bab tiga, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sengketa pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) khususnya dalam melihat dari sudut pandang Ethiopia. Adapun beberapa rekomendasi penelitian dari penulis adalah:

1. Membahas terkait sengketa Bendungan Ethiopia atau *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* melalui sudut pandang, teori dan fokus tahun penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan judul yaitu “*Analisis Kebijakan Ethiopia Dalam Upaya Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam di Sungai Nil Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Meles Zenawi Dalam Perspektif Kebijakan Luar Negeri*”. Judul tersebut bertujuan untuk menganalisis secara spesifik tujuan Ethiopia dalam upaya pembangunan bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* ditinjau dari sudut pandang politik ekonomi.

2. Merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk membahas terkait alasan Mesir berubah sikap yang sebelumnya menolak segala bentuk kerjasama yang hendak dilakukan negara hulu bersama negara hilir dalam proyek bendungan menjadi terlibat yang ditandai melalui *Declaration of Principles (DoP)* yang ditandatangani Mesir pada tahun 2015.

3. Melakukan penelitian dengan fokus melihat hubungan kerja sama antara Ethiopia dengan Tiongkok menggunakan teori interdependensi yang akan melihat bagaimana keterlibatan Tiongkok dalam sengketa pembangunan bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* menimbulkan sikap saling ketergantungan karena adanya hubungan kerja sama antara kedua negara.

Daftar Pustaka

- Abawari, Yaekob Mekuria. 2011. "Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI)." *International Institute of Social Studies, The Hague*.
- Aman, Ayah. 2016. *Egypt Seeks to Halt Ethiopian DAM*. Maret. <https://hornaffairs.com/2013/09/30/water-wars-egypt-condemn-ethiopia-nile-dam/amp/>.
- Asiedu, Martin. 2018. "The Construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and Geopolitical Tension Between Egypt and Ethiopia with Sudan in the Mix." *Global Political Trends Centre*.
- Bayeh, Endalcachew. 2015. "New Development in the Ethio-Egypt Relations over the Hydro-Politics of Nile: Questioning its True Prospects." *International Journal of Political Science and Development* 157-168.
- BBC News. 2012. *Ethiopian PM Meles Zenawi dies after illness*. Agustus. Accessed Januari 2022.
- Berhane, Daniel. 2011. *Grand Ethiopian Renaissance DAM*. September. <https://hornaffairs.com/2011/09/20/facts-grand-ethiopian-renaissance-dam/>.
- Brooke. 2014. *Dam-ed If You Don't: Egypt and The Grand Ethiopian Renaissance Dam Project*. February. <https://hornaffairs.com/2013/09/30/water-wars-egypt-condemn-ethiopia-nile-dam/amp/>.
- Cascão, Ana Elisa. 2009. "Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs. Cooperation?" *Water Alternatives* 240-270.
- Châtel, Francesca de, and Terje Oestigaard. 2007. "The Nile Shifting Balance of Powers." 34.
- Chekol, Yayew Genet. 2018. "Dynamics for Shifting the Ethio-Egyptian Hydro Political Relations." *International Journal of Political Science and* 115-122.
- n.d. *Ethiopia Economic Growth 1981-2023*. <https://www.macrotrends.net/countries/ETH/ethiopia/economic-growth-rate>.
- Gebreluel, Goitom. 2014. "Ethiopia's Grand Renaissance Dam: Ending Africa's Oldest Geopolitical Rivalry?" *The Elliott School of International Affairs, The Washington Quarterly* 20-40.
- Kemlu RI. 2018. *Profil Negara Ethiopia*. <https://www.kemlu.go.id/addisababa/id/pages/ethiopia/62/etc-menu>.
- Kidane, Bereket. 2016. *Meles Zenawi's Decision to Build Renaissance Dam was Out of Emotion: President Isaias*. Januari. <https://tesfanews.net/meles-zenawis-building-renaissance-dam-emotional-president-isaias/>.

- Lumumba, Patrick Loch Otieno. 2007. "The Interpretation of the 1929 Treaty and Its Legal Relevance and Implications for the Stability of the Region." *African Sociological Review* 10-25.
- Mekonnen, K. n.d. *The Defects and Effects of Past Treaties and Agreements on the Nile River Waters: Whose faults were day*.
<http://www.ethiopians.com/abay/engin.html>.
- Moghraby, Asim. 2018. "On the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)." *International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources*.
- Moszynski, Peter. 2011. *Ethiopia's controversial dam project*. Maret.
<https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/mar/07/ethiopia-controversial-dam-criticism-communities>.
- NN. 2015. *Newsletter Ethiopia Embassy in Brussels*. Maret.
<https://www.aucegypt.edu/news/stories/egypt-and-ethiopian-renaissance-dam>.
- Owiro, Arthur Okoth. 2004. *The Nile Treaty: State Succession and International Treaty Commitments: A Case Study of The Nile Water Treaties*. Nairobi: Konrad Adenauer Foundation.
- Reditya, Tito Hilmawan. 2021. *Bendungan Raksasa Ethiopia, Seluk Beluk dan Kontroversinya*. September.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/09/23/163731270/bendungan-raksasa-ethiopia-seluk-beluk-dan-kontroversinya?page=all>.
- RHMIRO, Rachid. 2006. "Conflict Over Nile Waters." *skripsi di Air University*,.
- Rosberg, Andreas. 2014. *Egypt, Ethiopia, and the Nile: Understanding Egypt's Refusal to Renegotiate the 1929 and 1959 Agreements Concerning Rights and Allocations of the Nile*. Oslo.
- Roth, Kenneth. 2010. *World Report 2011: Ethiopia*. <https://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/ethiopia>.
- Samaan, Mina Michel. 2014. "The Win-Win-Win Scenario in the Blue Nile's Hydropolitical Game: Application on the Grand Ethiopian Renaissance Dam." *Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialwissenschaften* 100.
- Schwartzstein, Peter. 2013. *Egyptian Condemn Ethiopia's Nile Dam Project*. September. <https://hornaffairs.com/2013/09/30/water-wars-egypt-condemn-ethiopia-nile-dam/amp/>.
- Snyder, Richard C., and Bruck. 2022. *Decision Making as an Approach to the Study of International Politics*. Palgrave Macmillan.
- State Information Service Egypt. 2018. *Egyptian-Ethiopian negotiations on Renaissance Dam*. Maret. <https://www.sis.gov.eg/Story/121622/Egyptian-Ethiopian-negotiations-on-Renaissance-Dam?lang=en-us>.

- Stewart, James. 2013. *Give the economic benefits of infrastructure a chance to breathe*. Februari. <https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2013/feb/11/economic-benefits-infrastructure-greater-manchester>.
- Swain, Ashok. 2011. "Challenges for Water Sharing in the Nile Basin: Changing Geo-Politics and Changing Climate." *Hydrological Sciences Journal* 670-702.
- Tandirerung, Sartika. 2014. "Faktor Domestik Ethiopia Meratifikasi Nile Basin Cooperative Framework Agreement Tentang Manajemen Redistribusi Aliran Sungai Nil Tahun 2013." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 640.
- The Nile Basin Initiative Act. 2022. *Egypt and the Ethiopian Renaissance Dam*. <https://www.aucegypt.edu/news/stories/egypt-and-ethiopian-renaissance-dam>.
- U.S. Department of Energy. 2014. "The Water-Energy Nexus: Challenges and."
- Ustman, Eliza. 2019. *6 Fakta Sungai Nil, Sungai Bersejarah di Peradaban Mesir Kuno*. <https://www.idntimes.com/science/discovery/eliza/fakta-sungai-nil-exp-c1c2>.
- Woldeyohannes, Yohannes Yihdego. 2017. "Nile River's Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)."
- World Bank. n.d. *Access to electricity (% of Population) Ethiopia*. <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ET>.
- Yihdego. 2017. "Nile River's Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)." *Global Journals Inc.* 12.